

**POLA ARTIKULASI DAN AGREGASI PDI PERJUANGAN  
DENGAN KEPENTINGAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

**Oleh**

**M. RIDHO HANDIKA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**Pola Artikulasi dan Agregasi PDI Perjuangan dengan Kepentingan  
Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung**

**Oleh**

**Muhammad Ridho Handika**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **Pola Artikulasi dan Agregasi PDI Perjuangan dengan  
Kepentingan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar  
Lampung**

Nama : **Muhammad Ridho Handika**

No. Pokok Mahasiswa : **1746021028**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

*R. Sigit Krisbintoro*

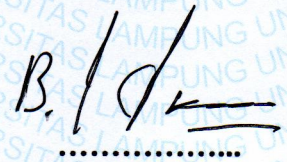
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**  
NIP. 196112181989021001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Budi Harjo S.Sos, M.IP**

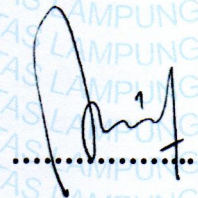


**Sekretaris**

**:-**

**Penguji**

**: Arizka Warganegara Ph.D**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**

**NIP. 196108071987032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Juni 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Ridho Handika  
NPM.1746021028

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Ridho Handika anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara. Dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 13 November 1999. Putra dari pasangan Bapak Nasirudin dan Ibu Hermalia S.Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan formal pertama kali di Taman Kanak-kanak (TK) AL-Munawaroh Tatakarya Lampung Utara tahun 2004. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) Di SD Negeri 01 Tatakarya Lampung Utara pada tahun 2011.

Pendidikan menengah pertama, penulis selesaikan di SMPN 02 Tumijajar Tulang Bawang Barat yang dimulai pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan menengah atas, penulis selesaikan di SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat yang dimulai pada tahun 2014 dan lulus di tahun 2017. Setelah menyelesaikan pendidikan formal selama 12 tahun penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Penulis pernah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Tatakarya, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung pada tahun 2020.

## **MOTTO**

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”  
**(Q.S Al-Baqarah : 286)**

*“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you  
that is greater than any obstacle.”*  
**(Christian D. Larson)**

“ Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.”  
**(Sutan Sjahrir)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu terucap kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa :

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Nasirudin dan Ibunda Hermalia yang senantiasa sabar dalam membimbing setiap langkahku, mendidikku dengan penuh cinta, mendoakan serta melimpahkan segenap kasih sayang, waktu, dan materi yang tiada terhingga dan tak akan bisa terbalaskan olehku.

Kakakku tersayang Vina Yuliantika dan adikku tersayang Fasya Ulfa Nabelia serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat dalam segala kondisi.

Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung.**

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Artikulasi dan Agregasi PDI Perjuangan dengan Kepentingan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung” Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Allah yaitu Muhammad Rasulullah SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. Selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang selalu memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi hingga akhir dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Budi Harjo S.Sos, M.IP. Selaku Dosen Pembimbing Utama, Terimakasih telah banyak memberikan saran, kritik dan masukan serta motivasi dengan sangat baik dan penuh kesabaran dalam membimbing peneliti guna menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir.

5. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D. Selaku Dosen Penguji, terimakasih telah banyak memotivasi dan memberikan arahan serta masukan dengan sangat baik dan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat peneliti kepada bapak dan ibu semua. Saya sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Serta seluruh Staf yang berperan membantu segala proses perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi JIP dengan baik. Terimakasih telah menjadi orang-orang baik yang berpengaruh bagi peneliti untuk merengguh ilmu pengetahuan selama masa kuliah yang penuh suka dan duka.
8. Bapak Dedi Yuginta, Bapak Selamat, Ibu Sri Ningsih dan masyarakat yang sangat menginspirasi dan memberikan banyak pengalaman hidup karena telah bersedia menjadi informan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Papaku Nasirudin terima kasih telah menjadi papah yang sangat membanggakan untuk anak-anaknya, yang selalu ada untuk keluarga dan selalu mendukung segala keputusanku, segala pilihanku, selalu memotivasiku dan menjadikan aku seseorang yang lebih kuat sebagai anak laki-lakimu. Mamaku Hermalia, terima kasih telah menjadi mama yang sangat baik hati, lembut dan bersabar untuk menjadikanku orang yang berhasil menyelesaikan pendidikan ini serta selalu mengajarkan nilai kehidupan yang baik kepada anak-anaknya, terimakasih telah menjadi tempat berkeluh-kesahku dalam segala keadaan. Semoga dari ilmu yang peneliti dapatkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada Papaku dan Mamaku tercinta.
10. Kakakku Tika dan Adikku Abel, terimakasih karena kalian yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dengan penuh rasa sayang dan sabar kepadaku dalam menyelesaikan pendidikan ini.

11. Keluarga besarku yaitu bibi, paman, nenek, sepupu, dan ponakan. Terima kasih sudah memberikan do'a, motivasi, dan nasihat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
12. Teruntuk kekasih hatiku dan juga calon istriku yaitu Dedemas Febriyanti, terima kasih karena mau bertahan dan berjuang sampai hari ini. Terima kasih juga telah menjadi rumah untukku kembali dari segala rasa penatku, tempat ternyaman, tempat terdamai dan segalanya buat aku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikanmu kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Selalu Bersama mewujudkan mimpi-mimpi kita.
13. Teman dari Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Reguler A, B, dan Paralel, yang sudah memberikan banyak momen indah selama kuliah.
14. Sahabat sejak SMP yaitu (Muhammad Restu Arief, Indra Wijaya dan Wisnu Hidayat) yang selama ini menjadi tempat curhat dan pemberi nasihat, serta setia menemani. Semoga kita dapat menjadi orang yang sukses dan selalu bersama-sama dalam suka maupun duka.
15. Teman-teman saya sejak SMA yaitu Viqih, Rian, Doni, Joan, Gatha, Okto, Roni, dan Hervin yang selama ini selalu mendoakan dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
16. Sahabat seperjuanganku yaitu Dedemas Febriyanti, Humaira Anisya, Rahmania Tisandi, Restu Ana Puari, Mevita Inestia, Bela Kharisma, Dinda Tamarani, Fauli Rahmi, Bella Lesta, Evando Yulisa, Satria Erlangga, Ridho Makarim, Abdi Setiawan, Rama Dhesriyan, Mamat, Imbang Kurniawan, Vio Malfino, Rendy dan Yogi terimakasih telah menjadi tempat terbaik dalam keadaan susah maupun senang. Terima kasih telah mewarnai kehidupan perkuliahanku selama ini. Semoga semua urusan dan semua impian kita dapat terwujud dan dimudahkan selalu dan semoga silaturahmi ini tetap terjaga.
17. Teman semasa PKL yang hingga kini tetap terjaga silaturahmiya yaitu Imbang, Vio, Rendy, Bella dan Micel, terimakasih telah menjadi teman yang baik dan selalu memotivasi serta mendukung penyelesaian skripsi ini.
18. Sepupu-sepupuku Iwan, Andi, Heri, Satria, Richo, Rahmat, Ikrom, Rudi, Akbar dan Anas, terima kasih telah memberikan banyak motivasi, doa, dan juga tenaga, semoga kita semua bisa sukses dan membanggakan keluarga kita.
19. Terimakasih kepada orang-orang baik lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih telah hadir di hidupku, berbagi banyak hal dan

mengukir sangat bermanfaat untukku, semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat dan baik, serta bahagia.

20. Terima kasih kepada diriku sendiri karena mau berusaha bertahan dan tidak menyerah dalam keadaan apapun, segala yang terjadi tentunya menguatkan dan menjadikan pribadi diri ini lebih baik, atas izin Allah SWT bisa menyelesaikan kewajiban dengan tuntas.

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

Muhammad Ridho Handika

## DAFTAR ISI

|                                      | <b>Halaman</b> |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....              | <b>ii</b>      |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....            | <b>iv</b>      |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....           | <b>v</b>       |
| <b>I. PENDAHULUAN</b> .....          | <b>1</b>       |
| 1.1 Latar Belakang.....              | 1              |
| 1.2 Rumusan Masalah.....             | 10             |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....           | 10             |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....          | 10             |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....    | <b>12</b>      |
| 2.1 Tinjauan Tentang Artikulasi..... | 12             |
| 2.2 Tinjauan Tentang Agregasi.....   | 14             |
| 2.3 Teori Komunikasi Politik.....    | 16             |
| 2.4 Konsep Partai Politik .....      | 20             |
| 2.5 Pedagang Kaki Lima.....          | 24             |
| 2.6 Kerangka Pikir.....              | 27             |
| <b>III. METODE PENELITIAN</b> .....  | <b>30</b>      |
| 3.1 Tipe Penelitian .....            | 30             |
| 3.2 Lokasi Penelitian.....           | 31             |
| 3.3 Fokus Penelitian.....            | 32             |
| 3.4 Informan.....                    | 32             |
| 3.5 Jenis Data.....                  | 33             |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data .....    | 34             |
| 3.7 Teknik Pengolahan Data.....      | 36             |
| 3.8 Teknik Analisis Data .....       | 38             |

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV. GAMBARAN UMUM.....</b>                          | <b>39</b>  |
| 4.1 Gambaran Umum DPC PDIP.....                        | 39         |
| 4.1.1 Partai PDI Perjuangan.....                       | 39         |
| 4.1.2 AD/ART PDIP Tahun 2019-2024.....                 | 40         |
| 4.1.3 Visi dan Misi PDI Perjuangan.....                | 42         |
| 4.1.4 Tata Kelola PDI Perjuangan.....                  | 46         |
| 4.1.5 Letak Geografis DPC PDI Perjuangan.....          | 47         |
| 4.1.6 Struktur organisasi DPC PDIP.....                | 48         |
| 4.2 Gambaran Umum DPRD.....                            | 49         |
| 4.2.1 Sejarah DPRD Kota Bandar Lampung.....            | 49         |
| 4.2.2 Kedudukan, Tugas, Hak Dan Kewajiban.....         | 51         |
| 4.2.3 Peraturan Tentang Tata Tertib DPRD.....          | 52         |
| 4.2.4 Struktur Organisasi DPRD Kota Bandar Lampung.... | 55         |
| 4.3 Gambaran Umum Dinas Perdagangan.....               | 56         |
| 4.3.1 Visi Dan Misi Dinas Perdagangan.....             | 56         |
| 4.3.2 Tujuan Dan Sasaran Dinas Perdagangan.....        | 57         |
| 4.3.3 Tupoksi Dinas Perdagangan.....                   | 58         |
| 4.3.4 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan.....       | 55         |
| 4.3.5 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan.....       | 65         |
| 4.4 Gambaran Umum Artikulasi dan Agregasi.....         | 66         |
| <br>   |            |
| <b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                    | <b>84</b>  |
| 5.1 Hasil Penelitian.....                              | 84         |
| 5.1.1 Pola Artikulasi.....                             | 73         |
| 5.1.2 Pola Agregasi.....                               | 79         |
| 5.2 Pembahasan.....                                    | 84         |
| 5.2.1 Pola Artikulasi.....                             | 84         |
| 5.2.2 Pola Agregasi.....                               | 89         |
| 5.2.3 Komunikasi Politik.....                          | 94         |
| <br>   |            |
| <b>VI. PENUTUP.....</b>                                | <b>98</b>  |
| 6.1 Simpulan.....                                      | 98         |
| 6.2 Saran.....   | 99         |
| <br>   |            |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                             | <b>100</b> |
| <br>   |            |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                   | <b>103</b> |

## **DAFTAR TABEL**

| <b>Tabel</b>                 | <b>Halaman</b> |
|------------------------------|----------------|
| 1. Penelitian Terdahulu..... | 6              |
| 2. Informan Penelitian.....  | 31             |

## DAFTAR GAMBAR

| <b>Gambar</b>   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| 1. Kerangka Pikir... ..   | 29             |
| 2. Infrastruktur DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung... ..       | 47             |
| 3. Struktur organisasi DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung ..... | 48             |
| 4. Struktur Organisasi DPRD Kota Bandar Lampung .....               | 55             |
| 5. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.....   | 66             |

## **ABSTRACT**

### **PDIP'S ARTICULATION AND AGGREGATION PATTERN WITH THE INTERESTS OF STREET VENDORS THE CITY OF BANDAR LAMPUNG**

**BY**

**M. RIDHO HANDIKA**

Market modernization is synonymous with a development process that takes time to realize a system from traditional markets to modern markets. The development process turned out to have an impact on the non-conduciveness of business actors, which happened in the SMEP Market. This development has been delayed for 16 years which has resulted in traders selling on Jalan Batu Sangkar, Kelapa. Three, Central Tanjung Karang District, Bandar Lampung City. The research aims to find out the aggression and articulation carried out by the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan as the winner of the general election in 2019 against the street vendors in SMEP market. The research used a descriptive method with a qualitative approach. The data collection technique composed of observation, interview, and documentation. The research results found that the articulation carried out by the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan was direct survey and dialogue with the street vendors in SMEP market as well as accepting their aspiration and interest who need a decent and comfortable selling place. According to the articulation, the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan did aggression in the form of continuing proposal of the previous construction of SMEP market used the Regional Government Budget (APBD) and controlling the SMEP market construction process in order to continue and finish the construction by 2021 and in the same year the market officially opened and occupied by the street vendors.

**Keywords : Articulation, Aggregation, Political Party**

## **ABSTRAK**

### **POLA ARTIKULASI DAN AGREGASI PDI PERJUANGAN DENGAN KEPENTINGAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**M. RIDHO HANDIKA**

Modernisasi pasar identik dengan suatu proses pembangunan yang membutuhkan waktu untuk merealisasikan sistem dari pasar tradisional hingga menjadi pasar modern. Proses pembangunan ternyata berdampak pada tidak kondusifnya para pedagang yang mana hal ini terjadi di Pasar SMEP. Pembangunan ini mengalami penundaan selama 16 tahun yang mengakibatkan para pedagang berjualan di ruas Jalan Batu Sangkar, Kelapa. Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Artikulasi dan Agregasi yang dilakukan PDI- Perjuangan sebagai partai pemenang dalam pemilu tahun 2019 terhadap pedagang kaki lima di Pasar SMEP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu artikulasi yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan adalah melakukan sidak langsung dan berdialog dengan pedagang kaki lima di Pasar SMEP serta menyerap aspirasi dan kepentingan para pedagang kaki lima yang membutuhkan tempat berdagang yang layak dan nyaman. Berdasarkan hasil Artikulasi maka PDI-Perjuangan melakukan Agregasi yaitu mengajukan usul melanjutkan kembali pembangunan Pasar SMEP menggunakan dana APBD dan melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan Pasar SMEP sehingga pembangunannya dapat di lanjutkan kembali dan selesai pada tahun 2021, pada tahun yang sama Pasar SMEP resmi di buka dan di tempati oleh para pedagang.

**Kata Kunci : Artikulasi, Agregasi, Partai Politik**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perjalanan kepartaian di Indonesia saat ini banyak mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat terutama pada saat menjelang pesta demokrasi yang di sebabkan oleh konflik internal pada pemilihan anggota legislative maupun eksekutif maupun konflik perebutan kepengurusan dalam partai politik yang membuat citra partai politik di Indonesia menjadi negative di mata masyarakat. Sedangkan masyarakat dengan penuh harapan kepada partai politik yang dianggap menjadi jembatan untuk mereka menyuarakan aspirasi yang mereka butuhkan guna terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 pada pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah :

"Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa sebagai pilar demokrasi partai politik sangat dibutuhkan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui proses artikulasi dan agregasi. Proses artikulasi dan agregasi dari partai politik kepada masyarakat di perlukan suatu bentuk komunikasi politik dari partai politik terhadap kepentingan masyarakat.

PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung sebagai partai yang mendapatkan dukungan besar di Kota Bandar Lampung sudah barang tentu memiliki tanggung jawab besar pula untuk melaksanakan fungsi komunikasi artikulasi dan agregasi politik. Kemampuan menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi dengan baik menjadi suatu modal sebuah partai politik untuk tetap mendapat dukungan publik. Dalam sistem politik demokratis, pesan politik atau aspirasi politik masyarakat berupa tuntutan (*demanding*) dan dukungan (*supporting*) selalu diarahkan kepada pemerintah, dan akan disalurkan oleh infrastruktur politik, seperti PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan bersama kelompok kepentingan, media dan aktor-aktor lainnya melalui fungsi-fungsi input terutama fungsi komunikasi politik, fungsi artikulasi kepentingan, dan fungsi agregasi kepentingan. Fungsi artikulasi kepentingan adalah proses penyampaian aspirasi politik masyarakat kepada lembaga pemerintah untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan atau kebijakan. Begitu pula sebaliknya, informasi atau pesan politik dari pemerintah berupa kebijakan (*policy*) atau keputusan (*decision*) diharapkan sampai kepada masyarakat melalui perantara infrastruktur politik. Namun khususnya fungsi artikulasi kepentingan juga sangat tergantung pada fungsi komunikasi politik (Maarotong, 2020).

Berdasarkan komunikasi politik yang di bangun PDI Perjuangan di harapkan membawa perubahan kearah yang lebih baik terutama pada masyarakat yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar yang ada di Kota Bandar Lampung yang masih perlu perhatian.

Pasar merupakan tempat berkumpulnya sejumlah pembeli dan sejumlah penjual di mana terjadi transaksi jual-beli barang-barang yang ada di sana. Menurut cara transaksinya pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung dan barang yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan pokok. Pedagang dan pasar tradisional harus benar-benar diperhatikan oleh Pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan, hal itu dikarenakan pasar tradisional menjadi salah satu jantung perekonomian masyarakat.

Kedudukan pasar tradisional masih tetap penting dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang bergantung hidup di pasar tradisional. Peran pasar sebenarnya sangat vital bagi perekonomian nasional. Selain menjadi pondasi dasar perekonomian, pasar tradisional juga mampu digunakan untuk memaksimalkan hasil bumi yang dikelola para petani. Pasar tradisional di Bandar Lampung banyak tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Salah satunya pasar SMEP yang sudah 16 tahun menanti terkait penyelesaian pembangunan pasar. Proyek pembangunan Pasar SMEP *modern* mulai dicetuskan pada 2003.

Pembangunan Pasar SMEP awalnya berkonsep cukup megah, dengan konsep seperti mal dan hotel. Kondisi tersebut sampai membuat mereka kecewa lebih dalam ketika Pemkot dengan memberi janji manis kepada para pedagang, sementara tata kelola, sarana prasarana serta sistem pengelolaan pasar lainnya belum siap, di sisi lain lapak penampungan sementara mereka telah dibongkar. “Padahal pasar SMEP akan dijadikan pasar percontohan untuk Bandarlampung sebagai tuan rumah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Nasional 2022. Maka sudah sepatutnya pengelolaan pasar dilakukan secara profesional, pendataan dilakukan secara benar dan menyeluruh” (Wijaya, 2021).

Pasar SMEP yang berada di jantung kota dan strategis diantara pasar legenda besar Bandar Lampung lainnya, yaitu Pasar Bambu Kuning dan Pasar Gintung. Ketiga pasar ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak sedikit menyumbang PAD pada masa emasnya. Kini harapan besarnya pemkot lebih serius membangun dan mengembangkan pasar ini agar lebih naik kelas melalui program modernisasi pasar tradisional. Pasar SMEP yang mangkrak membuat pertumbuhan ekonomi terganggu dan membuat pedagang yang akan kehilangan kios dagangannya. Pembangunan yang masih mangkrak membuat pedagang banyak berjualan dibibir jalan dan tumpah ruah bersama pedagang kaki lima.

Keberadaan PKL pada hakikatnya bukan untuk digusur atau dihapuskan, tetapi seharusnya diupayakan pembinaan dan diberikan tempat usaha. Pemerintah kota hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana dan berprinsip pada konsep manajemen konflik *win win solution*, sebelum PKL yang berjualan di trotoar sepanjang jalan protokol kota tumbuh semakin pesat. Prinsip *win win solution*, tersebut mutlak diperlukan agar upaya penertiban ini tidak menimbulkan gelombang reaksi dan protes dari PKL khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang merasa dirugikan atau disabotase hak-hak mereka untuk mencari nafkah dan penghidupan yang layak.

PKL sebagai kelompok sasaran dalam hal ini merupakan kelompok yang secara langsung dipengaruhi oleh suatu kebijakan. Kelompok sasaran yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan perencanaan kebijakan adalah mereka yang benar-benar telah memahami tujuan program, patuh terhadap peraturan yang ada dan kelompok sasaran yang bersedia bekerjasama dengan pemerintah untuk mensukseskan program demi terbentuknya pemberdayaan terhadap nasib PKL. Permasalahan yang terjadi di pasar SMEP membuktikan bahwa pemerintah kota dan DPRD kota Bandar Lampung belum mampu memperjuangkan aspirasi rakyatnya padahal tugas DPRD adalah pola artikulasi dan agregasi.

Pembangunan pasar SMEP terus mundur dari target penyelesaiannya. Kondisi itu kini membuat gedung tersebut kembali dipenuhi sampah. Contohnya lantai empat yang merupakan area parkir masih terdapat sisa-sisa bahan bangunan, seperti tumpukan pasir yang cukup banyak. Di lantai tiga, hanya terdapat lantai yang kotor dengan sampah berceceran. Bahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun lokasi itu kerap dijadikan tempat singgah anak jalanan yang cukup ramai. Sementara di lantai dua, tumpukan sampah yang cukup banyak hingga mengeluarkan bau tak sedap. Selain sampah, ada dua plastik merah berukuran besar dengan isi cairan hitam.

Pembangunan proyek senilai kurang lebih Rp. 45 miliar dan memiliki luas 63 x 56 m yang akan menyediakan ruang sebanyak 600-700 kios termasuk area parkir dan *basement*. Menurut Pengawas Kongsruksi PT Asmi Hidayat Muhammad Zen, selaku pemenang tender pembangunan Pasar SMEP mengakui adanya keterlambatan pembayaran gaji kepada para pekerja proyek. Akibatnya para pekerja diliburkan sementara waktu keterlambatan pencairan itu dipicu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung belum mencairkan dana proyek, kepada rekanan atau pihak ketiga yang menangani pembangunan pasar tersebut.

Hal itu sangat bisa dikatakan bahwa pemkot Bandar Lampung masih acuh terhadap pembangunan pasar SMEP. Tidak adanya perhatian dan peran dari DPRD Komisi II Kota Bandar Lampung yang membuat PDI Perjuangan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pembangunan di pasar SMEP. Kepedulian dari PDI Perjuangan ini menurutnya sebentar lagi memasuki musim penghujan, pihaknya menekankan kepada Dinas PU setempat, agar dapat mengawasi pekerjaan secara berkala. Mengingat pasar SMEP adalah areal yang susah akan pembuangan air, sehingga akan ada genangan air, dan pekerjaan akan terhambat.

Salah satu fungsi partai politik adalah komunikasi politik dan sosialisai politik. Artinya yang dapat mempengaruhi anggota DPRD dalam mengambil keputusan adalah partai politik karena partai politik memiliki hak *recall* terhadap anggota DPRD. Menurut Almond (1965) fungsi komunikasi politik yang terdapat secara *inherent* dalam sistem politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri. Sehingga efektif tidaknya fungsi ini dalam penyampaian pesan-pesan politik sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi input lainnya, seperti fungsi artikulasi kepentingan (*interest articulation function*) dan fungsi agregasi kepentingan (*interest aggregation function*) yang memang menjadi tanggung jawab infrastruktur politik, dalam hal ini partai politik.

Pengaruh itulah yang membuat arus komunikasi politik berlangsung secara timbal balik (*two way traffic communication*), yaitu mengalir (a) dari bawah ke atas, yaitu dari masyarakat ke penguasa politik, dan (b) dari atas ke bawah, yaitu dari penguasa politik ke masyarakat (*public*). Namun penulis membuat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut adalah penelitian terdahulu beberapa berupa jurnal terkait dengan penelitian penulis.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti | Tahun | Judul                                      | Fokus  |
|----|---------------|-------|--|--|
| 1. | Asiyah        | 2012  | Pedagang kaki lima membandel di Jawa Timur | Fokus Penelitian ini pada Problem utama perencanaan perkotaan di kota-kota besar adalah bagaimana mengakomodasi kepentingan dari pedagang kaki lima (PKL). |

| No | Nama Peneliti | Tahun | Judul   | Fokus   |
|----|---------------|-------|---|---|
| 2. | Aswitari      | 2016  | Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di kecamatan Denpasar barat       | Penelitian ini berfokus pada mengetahui pengaruh variable modal, lama USAha, dan jumlah tenaga kerja, terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Barat. |
| 3. | T Utami       | 2014  | Pemberdayaan komunitas sector informal PKL, suatu alternative penanggulangan                      | Penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya pemberdayaan di sektor informal pedagang kaki lima serta penanggulangannya.  |
| 4. | Magdalena     | 2018  | Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dari janji politik pada pilkada serentak tahun 2017. | Penelitian ini berfokus pada janji politik ketika Pilkada untuk penataan ulang serta pemberdayaan pedagang kaki lima  |

|    |           |      |  |   |
|----|-----------|------|--|---|
| 5. | Hasibuan  | 2013 | Artikulasi dan Agregasi kepentingan dalam kebijakan publik (Studi tentang peran partai persatuan pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas dalam menetapkan kebijakan publik. | Penelitian ini berfokus pada bagaimana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas dalam melakukan artikulasi kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pola kebijakan pembangunan daerah dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas dalam melakukan agregasi kepentingan masyarakat daerahnya |
| 6. | (Solihin) | 2018 | Implementasi fungsi artikulasi dan agregasi PKS Kota Bandung pada Pemilu 2019  | Penelitian ini berfokus pada untuk menentukan alternatif kebijakan yang akan diambil didasarkan pada pola atau fungsi agregasi yang duduk di DPRD Kota Bandung.   |

*Sumber : Diolah Peneliti, 2021.*

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang membahas tentang pola artikulasi dan agregasi. Sebelumnya terdapat berbagai penelitian terdahulu mengenai pola artikulasi dan agregasi melihat sudut pandang yang terjadi di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu karena penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menganalisis tentang pola artikulasi dan agregasi Partai PDI-P dengan kepentingan pedagang kaki lima yang berlokasi di Pasar SMEP Kota Bandar Lampung. Kebanyakan PKL

tidak menghiraukan tata tertib, kebersihan, dimana ada PKL disana timbul ketidak tertiban, kotor, kumuh, dan banyak sampah.

Dengan kata lain menimbulkan permasalahan berkaitan dengan usaha pengembangan tata ruang kota karena ketidak tertibannya PKL dengan pemerintah, akibatnya sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini. Jelas PKL tidak pernah habis dan dimanapun selalu ada sebagai implikasi pertambahan jumlah penduduk dan angkatan kerja, angkatan kerja tahun ini belum terserap sudah menyusul angkatan kerja selanjutnya demikian seterusnya.

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung pada Februari 2020 sebanyak 4,43 juta orang, naik 25,5 ribu orang dibandingkan Februari 2019. Pada Februari 2020, dari angkatan kerja tersebut sebanyak 4,24 juta orang penduduk bekerja sedangkan 189.700 orang masih menganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2020 tercatat sebesar 71,63 persen, turun sebesar 0,46 persen poin dibandingkan setahun yang lalu. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Februari 2020, TPAK laki-laki sebesar 87,38 persen sementara TPAK perempuan hanya sebesar 55,10 persen (Murdaningsih, 2020).

Sebagaimana diketahui bahwa laju pertumbuhan perkotaan disebabkan oleh migrasi dari desa dikarenakan ketidak mampuan pedesaan dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya di samping daya tarik perkotaan dengan tersedianya lapangan kerja bagi pendatang untuk meningkatkan pendapatan.

Pengartikulasian dan agregasi adalah salah satu tugas partai politik dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik dan sosialisasi politik. Hal ini akan menjadi usul kebijaksanaan melalui berbagai proses dari mulai penampungan aspirasi kepentingan yang sangat beragam, penggabungan kepentingan sampai pada pengartikulasian dan agregasi

tersebut. Oleh karena itu peneliti berfokus pada bagaimana pola artikulasi dan agregasi partai PDI Perjuangan. Oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **Pola Artikulasi dan Agregasi PDI Perjuangan Dengan Kepentingan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti mengenai permasalahan adalah Bagaimana PDI Perjuangan Melakukan Artikulasi dan Agregasi Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Pasar SMEP Kota Bandar Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Partai PDI Perjuangan Dalam Melakukan Artikulasi Dan Agregasi Terhadap Kepentingan Pedagang Kaki Lima Di Pasar SMEP Kota Bandar Lampung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Secara Teoritis**

Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dan ilmu pengetahuan, terutama tentang pola artikulasi dan agregasi yang dilakukan anggota legislatif untuk Pedagang Kaki Lima Secara Praktis.

2. Manfaat secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi anggota legislatif, dan yang berkordinasi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Tentang Artikulasi Politik

Artikulasi Kepentingan merupakan proses penampungan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat. Karena itu warga negara atau setidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. (Roby, 2012)

Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya. Bentuk artikulasi yang paling lazim di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislatif), atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya.

Menurut Solihin (2018) fungsi artikulasi kepentingan ini biasanya dilakukan oleh struktur yang disebut dengan *Interest Group* atau kelompok kepentingan. Contohnya: Di Inggris, Partai Konservatif harus bersaing dengan Partai Buruh dan Liberal dalam memperoleh dukungan dari berbagai kelompok kepentingan di negaranya. Dalam usaha memenangkan persaingan partai konservatif mengundang kelompok-kelompok ekonomi, regional, atau lokal untuk menyatakan keinginan mereka dan untuk ikut mempengaruhi kebijaksanaan Partai Konservatif melalui kegiatan-kegiatan perkumpulan masyarakat dan konferensi tahunan partai dan dalam komite-komite Partai Konservatif yang ada dalam parlemen.

Partai Konservatif bisa melakukan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan itu tetapi tidak bisa menguasainya. Seperti disebut diatas bahwa artikulasi kepentingan itu dilakukan oleh *interest group*. *Interest group* pada awalnya menampung kepentingan-kepentingan yang diajukan masyarakat. Kemudian kelompok-kelompok kepentingan itu membuat rumusan untuk kepentingan-kepentingan tersebut. (Solihin, 2018)

Kemudian disampaikan kepada badan-badan politik maupun pemerintah yang berwenang untuk membuat sebuah kebijaksanaan, dan diharapkan akan memperoleh tanggapan yang mungkin sekali dapat berwujud sebuah kebijaksanaan yang memungkinkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan masyarakat tadi. Gaya yang penting lainnya dari artikulasi kepentingan adalah tingkat kekhususan dari kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan masyarakat. Didalam suatu masyarakat atau negara kadang tuntutan-tuntutan dikemukakan tanpa memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang dia kemukakan.

Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislatif), atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, Partai Politik dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan,

kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya, proses pengartikulasian ini ada di dalam bagian input dalam tahapan perumusan kebijakan yang mekanismenya terdapat beberapa bagian yaitu input, proses, dan output dalam suatu kebijakan politik.

Artikulasi kepentingan sudah ada sepanjang sejarah dan kelompok kepentingan akan semakin tumbuh seiring semakin bertambahnya kepentingan manusia, jadi kelompok kepentingan hanya ingin mempengaruhi pembuatan keputusan dari luar, sedangkan partai politik dari dalam.

## **2.2 Tinjauan Tentang Agregasi Politik**

Menurut Rahardjo (2010) yaitu Agregasi kepentingan adalah cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok yang berbeda, digabung menjadi satu dan menghasilkan alternatif kebijakan pemerintah. Agregasi kepentingan dijalankan dalam “sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka, fungsi organisasi terjadi di tingkat atas, mampu dalam birokrasi dan berbagai jabatan militer sesuai kebutuhan rakyat dan konsumen”. Dalam masyarakat demokratis, Partai menawarkan program politik dan menyampaikan usul ke badan legislatif, calon yang diajukan untuk jabatan pemerintahan mengadakan tawar menawar (*bargaining*) pemenuhan kepentingan kalau kelompok kepentingan mendukung calon yang diajukan.

Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif. DPR berupaya merumuskan tuntutan dan kepentingan-kepentingan yang diwakilinya. Semua tuntutan dan kepentingan seharusnya tercakup dalam usulan kebijaksanaan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang. Namun penetapan kebijaksanaan (UU) bukanlah hak semata-mata pihak legislatif.

DPR bersama Presiden memiliki hak untuk mengesahkan Undang-Undang. Kedudukan DPR dan Presiden dalam fungsi agregasi kepentingan adalah sama, sebab kedua lembaga ini berhak untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU). Tentu saja akan terjadi persaingan ketat untuk mengangkat gagasan dan memenuhi tuntutan-tuntutan kelompoknya, akan tetapi dengan adanya prinsip musyawarah dan mufakat, sangat banyak membantu persaingan antara wakil partai dalam agregasi kepentingan.

Alternatif kebijaksanaan pada hakekatnya merupakan rumusan-rumusan kebijaksanaan umum, dimana kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang pernah diartikulasikan diakomodasikan, lalu dikombinasikan dan selanjutnya dikompromikan. Fungsi agregasi kepentingan ini dapat tumpang tindih dengan fungsi artikulasi kepentingan. Pada umumnya struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan adalah birokrasi dan partai politik. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bagi individu-individu yang mempunyai pengaruh yang besar didalam masyarakat untuk menjalankan fungsi agregasi kepentingan. (Solihin, 2018)

Setelah kita mengetahui struktur yang menjalankan agregasi kepentingan yang pada umumnya di setiap negara dijalankan oleh birokrasi dan partai politik maka perlu kita mengetahui gaya dari agregasi kepentingan. Menurut Solihin (2018) secara umum dapat dinyatakan bahwa terdapat gaya didalam agregasi kepentingan yang masing-masing mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Ketiga macam gaya itu adalah: *Pragmatic bargaining*, *Absolute value oriented* *Tradisionalistic*

Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif. DPR berupaya merumuskan tuntutan dan kepentingan-kepentingan yang diwakilinya. Semua tuntutan dan kepentingan seharusnya tercakup dalam usulan kebijaksanaan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang. Namun penetapan kebijaksanaan (UU) bukanlah hak semata-mata pihak legislatif. DPR bersama Presiden memiliki hak untuk mengesahkan Undang-Undang.

Kedudukan DPR dan Presiden dalam fungsi agregasi kepentingan adalah sama, sebab kedua lembaga ini berhak untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU). Tentu saja akan terjadi persaingan ketat untuk mengangkat gagasan dan memenuhi tuntutan-tuntutan kelompoknya, akan tetapi dengan adanya prinsip musyawarah dan mufakat, sangat banyak membantu persaingan antara wakil partai dalam agregasi kepentingan. Sama halnya dengan Artikulasi Politik Agregasi politik juga berada dalam satu wadah dengan Artikulasi Politik yaitu berada pada proses input di antara tiga bagian perumusan kebijakan yaitu *input*, *process*, dan *output*.

### 2.3 Teori Komunikasi Politik

Mendefinisikan komunikasi politik tidak cukup hanya dengan menggabungkan dua definisi, "komunikasi" dan "politik" memiliki konsep tersendiri yang secara sederhana merupakan gabungan dari dua konsep tersebut. Menurut Wahid (2016) komunikasi politik secara keseluruhan tidak bisa dipahami tanpa menghubungkan dengan dimensi politik dengan segala aspek dan problematikanya. Kesulitan dalam mendefinisikan komunikasi politik terutama dipengaruhi oleh keragaman sudut pandang terhadap kompleksitas realitas sehari-hari. Kalaupun komunikasi dipahami secara sederhana sebagai "proses penyampaian pesan", tetap akan muncul pertanyaan, apakah dengan demikian komunikasi politik berarti "proses penyampaian pesan politis".

Lalu apa yang disebut pesan-pesan politis itu. Berkenaan dengan hal ini, sebelum memahami konsep dasar komunikasi politik, perlu terlebih dahulu ditelusuri pengertian politik paling tidak dalam konteks yang menjadi masalah dalam penelitian ini. *Politics*, dalam bahasa Inggris, adalah sinonim dari kata politik atau ilmu politik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani pun mengenal beberapa istilah yang terkait dengan kata politik, seperti *politicos* (menyangkut warga negara), *polites* (seorang warga negara), *polis* (kota atau negara), dan *politeia* (kewargaan).

Almond (1965) melihat komunikasi politik sebagai bagian dari sistem politik, karena berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi input sistem politik. Menurut Almond (1965) fungsi komunikasi politik yang terdapat secara *inherent* dalam sistem politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri. Sehingga efektif tidaknya fungsi ini dalam penyampaian pesan-pesan politik sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi input lainnya, seperti fungsi artikulasi kepentingan (*interest articulation function*) dan fungsi agregasi kepentingan (*interest aggregation function*) yang memang menjadi tanggung jawab infrastruktur politik, dalam hal ini partai politik.

Pengertian leksikal seperti ini mendorong lahirnya penafsiran politik sebagai tindakan-tindakan, termasuk tindakan komunikasi, relasi sosial dalam konteks bernegara atau dalam urusan publik. Penafsiran seperti ini sejalan dengan konsepsi seorang antropolog seperti Smith yang menyatakan bahwa politik adalah serangkaian tindakan yang mengarahkan dan menata urusan-urusan publik (Naroll dan Cohen, 1970: 486).

Selain terdapat fungsi administratif pemerintahan, dalam sistem politik juga terjadi penggunaan kekuasaan (*power*) dan perebutan sumber-sumber kekuasaan. Smith sendiri memahami kekuasaan sebagai pengaruh atas pembuatan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang berlangsung secara terus menerus. Konsep lain yang berkaitan dengan politik adalah otoritas (*authority*), yaitu kekuasaan (*formal*) yang terlegitimasi. (Anggara, 2013)

Untuk dapat mengatur konflik tentu tidak bisa menghindari pentingnya kekuasaan dan otoritas formal seperti dinyatakan dalam pengertian sebelumnya. Penguasa yang tidak memiliki kekuasaan tidak akan pernah mampu mengatasi masalah-masalah yang sewaktu-waktu muncul dalam masyarakat. Konsekuensinya, ia dengan sendirinya akan kehilangan legitimasi dan dianggap tidak berfungsi. Bahkan pada tingkat tertentu, terutama jika tetap bertahan berkuasa, penguasa seperti itu memiliki potensi otoriter, dan berakibat pada situasi semakin melemahnya kedaulatan rakyat.

Dalam keadaan seperti ini, komunikasi politik akan semakin kehilangan fungsi yang sesungguhnya.

Proses politik seperti itu, terlihat kemudian posisi penting komunikasi politik terutama sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan yang dapat memfungsikan kekuasaan. Proses ini berlangsung di semua tingkat masyarakat dan setiap tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya; bahkan di antara anggota masyarakat dengan para penguasanya. Sebab dalam kehidupan bernegara, setiap individu memerlukan informasi terutama mengenai kegiatan masing-masing pihak menurut fungsinya.

Pemerintah membutuhkan informasi tentang kegiatan rakyatnya; dan sebaliknya, rakyat juga harus mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintahnya. Itulah sebabnya, kata Nasution (1990), sistem politik demokrasi selalu mensyaratkan adanya kebebasan pers (*freedom of the press*) dan kebebasan berbicara (*freedom of the speech*). Dan semua fungsi-fungsi ini secara timbal balik dimainkan oleh komunikasi politik.

Komunikasi politik menurut Dahlan (2018) yaitu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku atau kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau pengaruh terhadap perilaku politik. Harsono Suwardi kemudian membagi pengertian komunikasi politik dalam dua arti, yaitu (1) arti sempit dan (2) arti luas. Dalam arti sempit komunikasi politik diartikan sebagai setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang, maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucapkan, ataupun dalam bentuk isyarat yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam puncak suatu struktur kekuasaan tertentu. Pendapat Dan Nimmo (1987).

Harsono Suwardi kemudian menjelaskan komunikasi politik dalam arti sempit sebagai suatu komunikasi dapat dikategorikan mempunyai nilai atau bobot politik, apabila komunikasi yang dimaksud mempunyai konsekuensi-konsekuensi atau akibat politik (faktual atau potensial) yang mengatur tingkah laku manusia di bawah kondisi pertentangan (konflik). Sedangkan dalam arti luas komunikasi politik diartikan sebagai setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan informasi politik dari suatu sumber ke sejumlah penerima pesan misalnya pidato presiden.

Bagi Harsono Suwardi mengkaji komunikasi politik pada hakekatnya juga mengkaji tiga macam media komunikasi politik, yaitu (1) media interpersonal, (2) media organisasi, dan (3) media massa. Media komunikasi politik yang pertama (interpersonal) sama dengan retorika, sedang yang kedua (organisasi) sama dengan propoganda, adapun media yang ketiga (media massa) sama dengan periklanan. Dalam komunikasi interpersonal, komunikasi politik akan menekankan pada peran *opinion leadership*. Misalnya diskusi dalam kampanye politik yang umumnya bersifat interpersonal/pribadi dengan mengandung aspek-aspek *homophily*, *self-disclosure*, dan *coorientation*.

Sedangkan Menurut McQuail (1985) dalam komunikasi massa studi komunikasi politik lebih banyak melihat pada implikasi politik dari digunakannya media komunikasi massa. Komunikasi massa adalah suatu proses melalui mana komunikator-komunikator menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan secara luas dan terusmenerus menciptakan makna-makna serta diharapkan dapat mempengaruhi khalayak besar dan beragam dengan melalui berbagai cara. Itulah sebabnya mengapa studi media massa dalam komunikasi politik lebih banyak berkisar pada dua hal, yaitu (1) peran media massa dalam kampanye politik dan (2) hubungan antara pemerintah dengan media pemberitaan.

Kedua faktor tersebut pada hakekatnya menyangkut informasi politik. Menurut William Stephenson (1967) mengartikan informasi sebagai *supply*, penyimpanan, pengaruh balik dari fakta. Informasi adalah sejumlah pilihan alternatif yang tersedia bagi seseorang untuk memprediksi hasil akhir (*outcome*). Sehingga makin banyak informasi yang dimiliki oleh publik, makin banyak pilihan bagi publik untuk bersikap dalam sebuah situasi.

Dengan kata lain informasi politik adalah sejumlah ketidak pastian politik dalam suatu situasi atau sesuatu yang tidak jelas, sehingga dalam situasi politik yang sudah sangat jelas maka tidak ada lagi informasi yang dibutuhkan. Di sinilah pentingnya formula komunikasi Harold Laswell – *who says what to whom in which channel and with what effect* dihubungkan dengan formula politik Harold Laswell – *politics: who gets what, when, how*; masalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana.

#### **2.4 Konsep Partai Politik**

Pengertian partai politik sangat beranekaragam yang telah dikemukakan oleh para ahli tergantung dari sudut pandang mana para ahli tersebut melihat partai politik. Namun pada intinya semuanya itu mengacu pada arti bahwa partai politik tersebut merupakan organisasi atau tempat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Budiardjo (2003) bahwa: secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.

Definisi partai politik di atas pengertiannya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh R.H. Soltau dalam Budiardjo (2000), mengemukakan partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan

memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Partai politik sebagai sarana untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan merupakan ciri umum dari tujuan partai politik. Ada beberapa ciri lain seperti partai politik sebagai berikut: berakar dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan secara terus menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, dan ikut serta dalam pemilihan umum. (Maarotong, 2020)

Berdasarkan ciri-ciri itu, suatu organisasi politik yang tidak berakar di tengah-tengah masyarakat, tidak memiliki cabang di daerah-daerah, tidak mempunyai kegiatan secara berkesinambungan, tidak ikut serta dalam pemilihan umum, dan tidak mempunyai wakil di parlemen, tidak dapat dikategorikan sebagai partai politik. Sebab tanpa memenuhi persyaratan ini, organisasi politik sulit menjalankan fungsi untuk memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan memperjuangkan melalui proses politik.

### **1. Fungsi Partai politik**

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dikemukakan bahwa: Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung system presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi.

Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai politik baik fungsi Partai politik terhadap negara maupun fungsi Partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) disebutkan Partai politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- d. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi Partai politik sebagaimana dimaksud adalah:

### **1. Sosialisasi Politik**

Yang dimaksud dengan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak disengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

## **2. Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.

## **3. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik, dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

## **4. Pemadu Kepentingan**

Fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama partai politik sebelum mencari dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi pemaduan kepentingan ialah kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

## **5. Komunikasi Politik**

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan

pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.

Peran partai politik sangat dominan dalam sebuah negara yang demokratis. Karena dengan adanya partai politik sebagai kelompok kepentingan yang terorganisir dan mempunyai tujuan dan cita-cita yang jelas, maka organisasi partai politik tersebut tersebut akan menjadi jembatan bagi rakyat untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasinya, selain itu partai politik tidak hanya sebagai organisasi politik, akan tetapi sebuah organisasi yang memberikan pendidikan politik pada rakyat, melalui pendidikan politik yang berlangsung secara teratur dan sistematis.

## **2.5 Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima (*trottoar/pedestrian*) yang keberadaannya tidak boleh mengganggu fungsi publik, baik ditinjau dari aspek sosial, fisik, visual, lingkungan dan pariwisata”. Banyak penjelasan yang dapat ditemui jika membahas mengenai PKL. Keberadaan PKL disini sangat menarik untuk dibahas satu persatu, misalnya mengenai dampak atas keberadaan PKL maupun mengenai cara pemerintah untuk menata PKL tersebut. Sekilas PKL hanyalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Seperti penjelasan tentang PKL diatas, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa: Istilah PKL erat kaitannya dengan istilah di Perancis tentang pedestrian untuk pejalan kaki disepanjang jalannya, yaitu *Trotoir*.

Di sepanjang jalan raya kebanyakan berdiribangunan bertingkat. Pada lantai paling bawah biasanya disediakan ruang untuk pejalan kaki (*trottoir*) selebar 5 kaki. Pada perkembangan berikutnya para pedagang informal akan menempati trottoir tersebut, sehingga disebut dengan istilah pedagang lima laki, sedangkan di Indonesia disebut pedagang kaki lima atau PKL. Sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Sosialisasi adalah proses orang memperoleh kepercayaan sikap nilai dan kebiasaan dalam kebudayaan.

Melalui proses sosialisasi akan tumbuh satu pribadi yang hak karena sifat-sifat kelompok tidak pernah diserap secara sama oleh masing-masing anggota kelompok. Secara harfiah sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi atas sesuatu kepada masyarakat supaya sesuatu yang disosialisasikan itu bisa diterima dan tidak mendapat reaksi negatif dari masyarakat. (Zubaedi, 2013)

Karakteristik bentuk usaha PKL tersebut dapat memunculkan PKL baru di kawasan perkotaan. Hal ini diakibatkan ketidakseimbangan pembangunan antara pedesaan dan perkotaan. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan peluang pekerjaan yang diharapkan di perkotaan semakin sempit, ditambah dengan banyaknya lapangan pekerjaan *outsourcing* yang tidak ada kepastian kesejahteraannya.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor munculnya sektor informal (PKL) yang diciptakan oleh mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka dan mendapatkan kesejahteraan. Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal". Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja

yang lambat di sektor industri, dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam membuka usaha di trotoar tampak dilematis sebab mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya.

Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. PKL juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan baru yang unik dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian PKL dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah. Kegiatan perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk berusaha.

PKL sebagai produk urbanisasi yang timbul tanpa adanya suatu pembekalan yang khusus, menimbulkan anggapan dari masyarakat luas sebagai suatu bentuk ketimpangan pembangunan. Berkembangnya PKL menciptakan suatu aktivitas PKL yang beragam setiap harinya. Aktivitas PKL timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh formal. Aktivitasnya sering dianggap menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sering dipojokkan sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan seperti mengganggu pergerakan pejalan kaki atau menyebabkan kemacetan lalu.

PKL dalam melakukan aktivitasnya, memilih ruang yang mudah diakses orang seperti trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka publik yang seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat sekarang berubah menjadi kawasan komersial. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang terbuka public

sebagai ruang aktivitasnya. Keberadaan PKL ini tentunya akan mengurangi peran ruang terbuka publik, meskipun keberadaan PKL ini sebenarnya menjadi salah satu faktor pendukung aktivitas di ruang terbuka publik.

## 2.6 Kerangka Pikir

Peran pasar sebenarnya sangat vital bagi perekonomian nasional. Selain menjadi pondasi dasar perekonomian, pasar tradisional juga mampu digunakan untuk memaksimalkan hasil bumi yang dikelola para petani. Pasar tradisional di Bandar Lampung banyak tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.

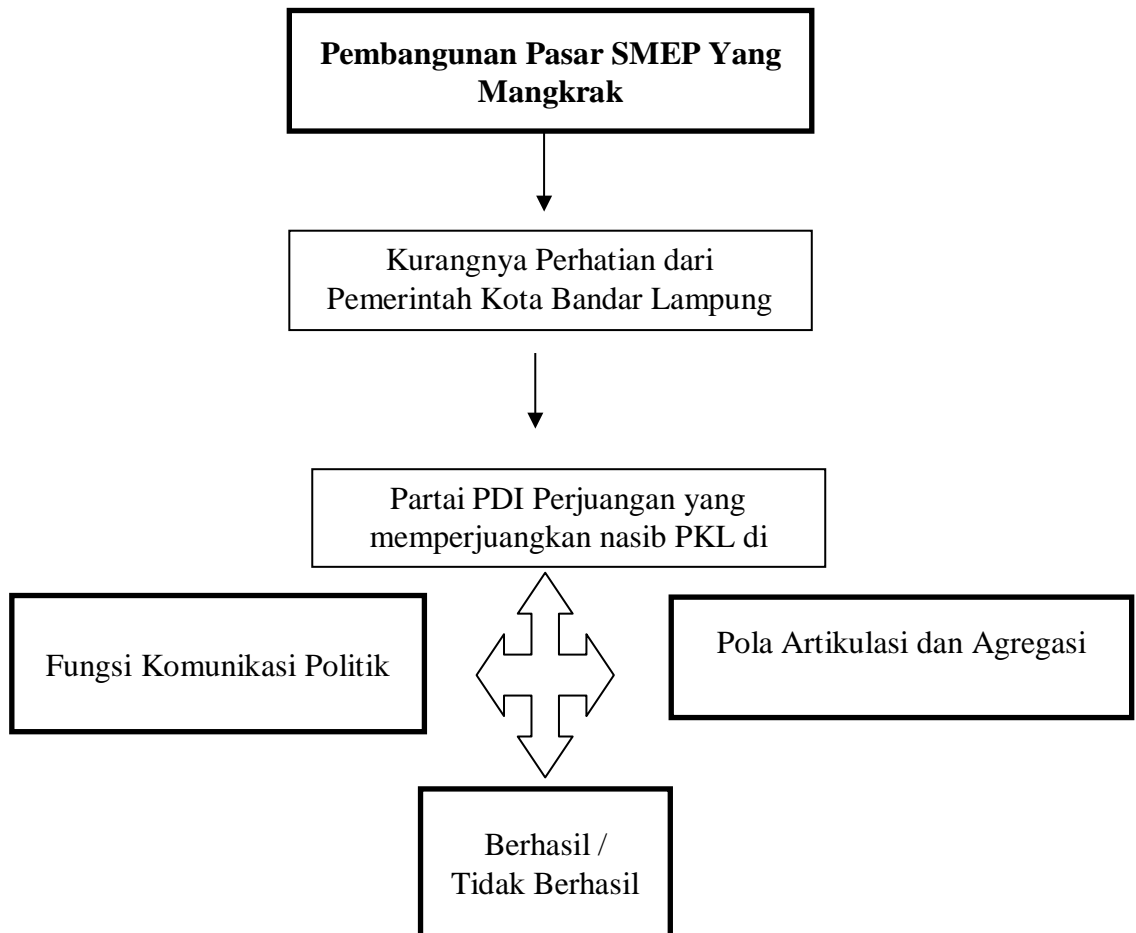
Pasar SMEP yang berada di jantung kota dan strategis diantara pasar legenda besar Bandarlampung lainnya, yaitu Pasar Bambu Kuning dan Pasar Gintung. Proyek pembangunan Pasar SMEP modern mulai dicetuskan pada 2003. Pembangunan Pasar SMEP awalnya berkonsep cukup megah, dengan konsep seperti mal dan hotel. Kondisi tersebut sampai membuat mereka kecewa lebih dalam ketika Pemkot dengan memberi janji manis kepada para pedagang, sementara tata kelola, sarana prasarana serta sistim pengelolaan pasar lainnya belum siap, di sisi lain lapak penampungan sementara mereka telah dibongkar. Padahal pasar SMEP akan dijadikan pasar percontohan untuk Bandarlampung sebagai tuan rumah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Nasional 2022.

Pembangunan yang masih mangkrak membuat pedagang banyak berjualan dibibir jalan dan tumpah ruah bersama pedagang kaki lima. Salah satu fungsi partai politik sebagai komunikasi politik. Partai politik yang menyalurkan keinginan rakyat yang mewakili yakni disebut DPRD. Artinya yang dapat mempengaruhi anggota DPRD dalam mengambil keputusan adalah partai politik karena partai politik memiliki hak *recall* terhadap anggota DPRD.

Pengartikulasian dan agregasi adalah salah satu tugas partai politik dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik. Hal ini akan menjadi usul kebijaksanaan melalui berbagai proses dari mulai penampungan aspirasi kepentingan yang sangat beragam, penggambungan kepentingan sampai pada perngarikulasian dan agregasi tersebut.

Adapun yang menjadi gambaran dari kerangka pikir dalam penelitian pada gambar berikut :

**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**



*Sumber : Diolah Peneliti, 2021*

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penggambaran suatu fenomena dengan kata-kata bukan dengan angka-angka. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya (Nazir, 1988:31).

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiono, 2010:21) “Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat” (Whitney, 1960:34).

Memilih pendekatan tertentu dalam kegiatan penelitian harus disadari bahwa ia memiliki konsekuensi tersendiri sebagai sebuah proses yang harus diikuti secara konsisten dari awal hingga akhir agar memperoleh hasil yang maksimal dan bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas, daya jangkauan dan maksud dari pendekatan tersebut (Bungin, 2012:18). Pada pelaksanaannya, berpikir ilmiah ini juga memerlukan adanya suatu sarana agar semua tahapannya dapat dilakukan dengan baik (Widi, 2010:11). Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini segala bentuk data dan informasi baik yang terdapat pada individu, kelompok, lokasi penelitian tak dapat terpisahkan dimana semua aspek objek penelitian dapat memiliki data dan informasi dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini.

Penulis berharap dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data dan informasi yang terkumpul dari objek penelitian, sehingga didapat data dan informasi mengenai pola artikulasi dan agregasi PDI Perjuangan dengan kepentingan pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, peneliti memilih metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan masalah yang dilihat. Selain itu alasan peneliti tidak menggunakan metode kuantitatif dikarenakan bukan meneliti yang berfokus pada sampel tertentu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan bukan juga menggunakan *mix method* yang menggunakan atau menggabungkan kedua pendekatan penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif (Sugiono, 2011).

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari

fenomena yang dihadapi. Adapun dalam menentukan lokasi penelitian diantaranya yang pertama dilaksanakan di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung, Jl. Pangeran Emir Noer, Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung

### 3.3 Fokus Penelitian

“Perumusan fokus masalah dalam penelitian deskriptif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah masih tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan” (Moleong 2005:34). Fokus Penelitian ini melihat dan mengkaji peranan kader partai PDI Perjuangan terhadap pola artikulasi dan agregasi untuk pedagang kaki lima. Peranan ini dapat dilihat baik dari segi kebijakan, peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima.

Penelitian ini berfokus menggunakan teori komunikasi dari Gabriel Almond (1965) dengan melihat pola Artikulasi dan Agregasi yaitu :

1. Artikulasi Politik yaitu yang dilakukan Partai PDI-P yang diharapkan terwujudnya selesainya pasar SMEP yang mangkrak agar pedagang kaki lima tidak berdagang di pinggir jalan.
2. Agregasi Politik yaitu tuntutan dari PDI Perjuangan dan dibantu DPRD terhadap pemerintahan kota agar pasar SMEP segera menyelesaikan pembangunan.

### 3.4 Informan

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja, yakni peneliti memilih secara langsung informan, dalam hal ini adalah orang yang berkompeten. Memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. *Verstehen* adalah

cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Anis dan Kandung, 2014:9). Untuk itu informan dari penelitian ini adalah :

**Tabel 2. Informan Penelitian**

| No. | Nama         | Jabatan   | Alasan  |
|-----|--------------|---|---|
| 1.  | Dedi Yuginta | Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Fraksi PDI Perjuangan | Peran sebagai anggota DPRD yang memiliki tugas pola artikulasi dan agregasi   |
| 2.  | Sri Ningsih  | Wakil Bendahara Partai PDI-P Kota Bandar Lampung                | Peran sebagai anggota partai politik yang ingin memperjuangkan nasib PKL.     |
| 3.  | Selamet      | KUPT Pasar SMEP Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung           | Peran sebagai dinas yang berkoordinasi dengan pemerintah kota Bandar Lampung. |
| 4.  | Eka Wati     | Pedagang Kaki Lima  | Peran sebagai pedagang kaki lima yang menunggu pembangunan yang belum selesai |

*Sumber: Diolah Peneliti, 2022.*

### 3.5 Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek asal data dapat diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data. Sumber data utama dalam penelitian deskriptif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu bagian jenis data dibagi

dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto (Moleong, 2005 :157). Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder (Morse dalam Flick, 2014:166).

### **1. Data primer**

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, baik melalui pengamatan secara langsung maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa narasumber. Dalam konteks ini, data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan menggunakan panduan wawancara.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperlukan dalam rangka untuk melengkapi informasi dari data primer. Data sekunder juga digunakan sebagai data pendukung guna memperkuat data primer. Sumber dari data sekunder dalam penelitian ini ialah bersumber dari dokumentasi berupa foto pengamatan penelitian, rekaman video penelitian, dan sumber dari media berita online.

## **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini penulis memilih jenis penelitian deskriptif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik sesuai dengan fakta di lapangan. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dan, wawancara. Menurut Sugiyono, (2009), adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

## 1. Observasi

Pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Pada penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana penulis ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan operasi PKL.

## 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Namun disini penulis memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka penulis meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam.

Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, penulis menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. Hal tersebut dilakukan guna memudahkan penulis dalam memperoleh informasi dari informan. Penulis harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan.

Peneliti menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya proses wawancara lebih terbuka. Menurut (Fylan, 2005) Wawancara semi-terstruktur hanyalah percakapan di mana anda tahu apa

yang ingin anda ketahui sehingga memiliki serangkaian pertanyaan untuk ditanyakan dan ide bagus tentang topik apa yang akan dibahas tetapi percakapan itu bebas untuk bervariasi, dan kemungkinan besar untuk mengubah secara substansial di antara peserta.

### **3. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah, pengumpulan data yang data atau informasinya berupa catatan peristiwa yang lampau atau sudah terjadi. Dokumentasi dapat berupa catatan, tulisan, gambar, foto, video, rekaman suara, dll. Untuk melengkapi data dalam analisis yang sedang diteliti, maka memerlukan informasi dari dokumen yang mendukung seperti media massa (Koran, media massa, berita online) terkait dengan penelitian.

### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam sebuah penelitian, karena dengan menggunakan teknik pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Editing Data**

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Dalam tahap ini, data yang dianggap dapat merugikan suatu pihak atau berisi konten dan hal yang tidak bernilai ataupun tidak relevan dengan penelitian harus disingkirkan. Penulis melakukan kegiatan memilih hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan EYD. Data yang telah diolah menjadi

rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi.

## **2. Interpretasi Data**

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2007:328). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Data kualitatif yang berupa data dalam bentuk foto, kata-kata, tindakan peneliti dan peristiwa di kehidupan sosial.

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh penulis. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan.

Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan penulis pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk table dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

## 3. Verifikasi data dan Kesimpulan

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan penulis dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses *display* data. Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. Data dianalisis dan diperiksa keabsahannya untuk disimpulkan.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Gambaran Umum DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung**

#### **4.1.1 Partai PDI Perjuangan**

Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Salah satu partai politik di Indonesia yaitu PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan didirikan pada tanggal 10 Januari 1973, merupakan fusi (penggabungan) dari beberapa partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

#### **4.1.2 AD/ART PDIP Tahun 2019-2024**

### **BAB I**

#### **NAMA, WAKTU, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

Partai politik ini bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat dengan PDI Perjuangan.

##### **Pasal 2**

PDI Perjuangan yang untuk selanjutnya disebut Partai, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

##### **Pasal 3**

Dewan Pimpinan Pusat Partai berkedudukan di Jakarta atau Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### **Pasal 4**

Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terstruktur sesuai jenjang administrasi pemerintahan dan wilayah perwakilan luar negeri yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.

### **BAB II**

#### **ASAS, JATIDIRI, DAN WATAK**

##### **Pasal 5**

- (1) Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945.
- (2) Jatidiri Partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.
- (3) Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner.

BAB III  
ARTI, TUJUAN, FUNGSI, DAN TUGAS  
BAGIAN PERTAMA

ARTI PARTAI

Pasal 6

Partai adalah:

- a) alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b) alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
- c) alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d) wadah komunikasi politik, pengembangan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e) wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV  
KEANGGOTAAN

BAGIAN PERTAMA  
REKRUTMEN, JENIS DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 11  
Rekrutmen

- a) Partai melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai. Setiap orang dapat mendaftarkan diri sebagai anggota
- b) Partai dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Partai.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen anggota partai diatur dalam ART Partai

#### **4.1.3 Visi dan Misi PDI Perjuangan**

##### **Visi PDI Perjuangan**

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah :

Partai adalah:

1. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
2. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat *sosio nasionalisme*, dan sosio demokrasi (*Tri Sila*);
3. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*Eka Sila*);
4. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
5. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

##### **Misi PDI Perjuangan**

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

1. mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
2. berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

1. membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
2. membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
3. memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
4. berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
5. menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan

cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

1. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
2. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
3. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
5. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
6. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10 Partai mempunyai tugas:

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
3. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan trisakti sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;

5. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
6. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
8. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

#### **4.1.4 Tata Kelola PDI Perjuangan**

##### **Mewujudkan PDI Perjuangan Menjadi Partai Pelopor**

Untuk mewujudkan PDI Perjuangan menjadi Partai Pelopor sesuai Anggaran Dasar Pasal 31 dan Anggaran Rumah Tangga Partai Pasal 17 ayat 4, maka PDI Perjuangan harus membangun dan menyusun konsep kebijakan dan program strategis partai yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penguatan Partai :

1. Menata dan memantapkan mekanisme organisasi
2. Menyusun kebijakan umum tentang pengembangan organisasi sayap Partai dan membangun afiliasi dengan organisasi-organisasi sektoral, serta melakukan pembinaan dan penguatan terhadap komunitas-komunitas juang Partai
3. Menyusun kebijakan umum tentang pengembangan organisasi sayap Partai dan membangun afiliasi dengan organisasi-

organisasi sektoral, serta melakukan pembinaan dan penguatan terhadap komunitas-komunitas juang Partai.

#### **4.1.5 Letak Geografis DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung**

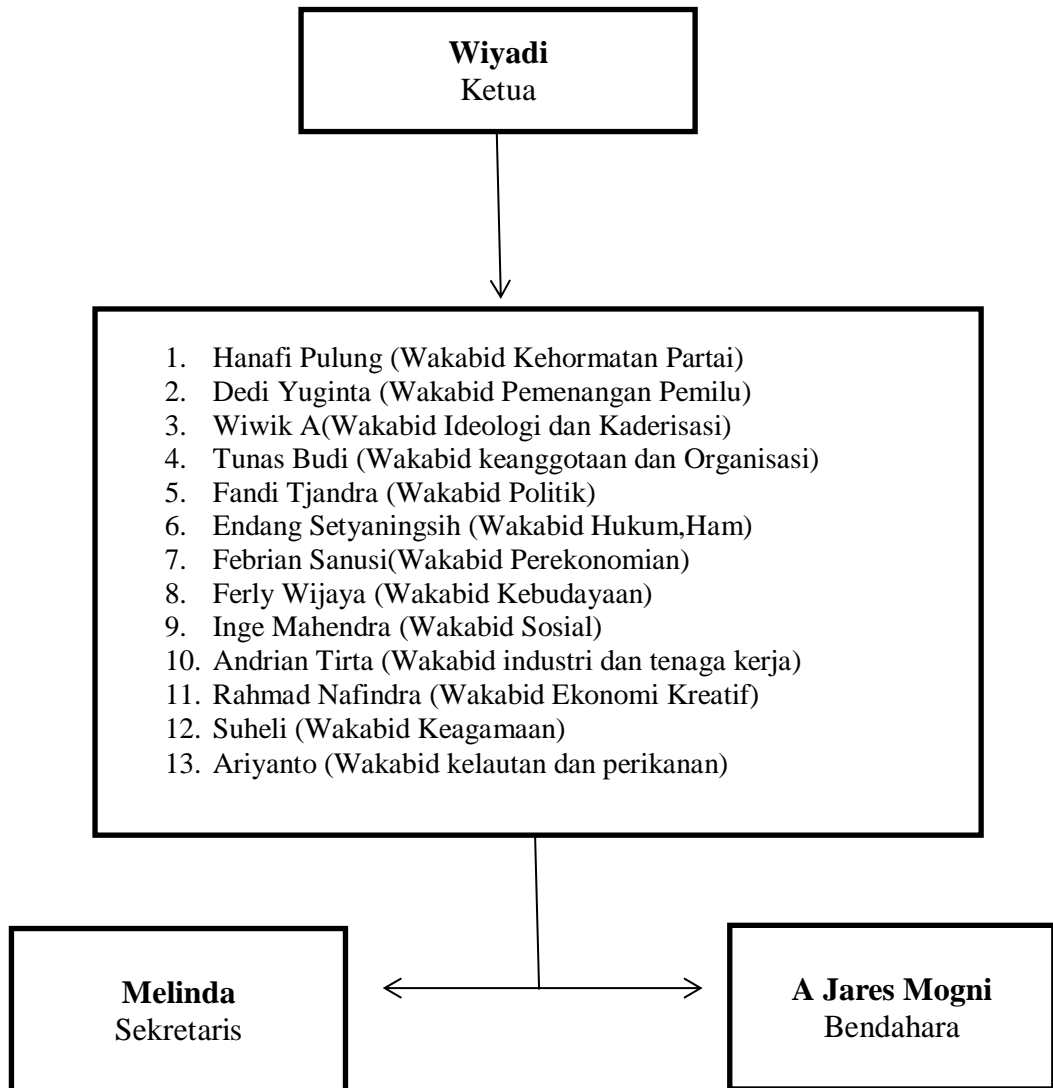
Lokasi DPC PDI Perjuangan berada di Jl. Pangeran Emir Moehammad. Noer, Durian Payung, Kecamatan Tamjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211

**Gambar 2 : Infrastruktur DPC PDI Perjuangan**



*Sumber: Dokumentasi kegiatan dari Peneliti, 2022.*

#### 4.1.6 Struktur organisasi DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung



*Gambar 3. Struktur organisasi DPC PDI Perjuangan*

## **4.2 Gambaran Umum DPRD**

### **4.2.1 Sejarah DPRD Kota Bandar Lampung**

Tidak banyak literatur yang menjelaskan sejarah awal terbentuknya DPRD Kota Bandar Lampung. Namun demikian untuk menjelaskan terbentuknya DPRD Kota Bandarlampung ada satu referensi yang bisa dijadikan untuk menjelaskan sejarah DPRD Kota Bandar Lampung, yaitu dokumen lukisan yang terpampang digedung Utama DPRD Kota Bandar Lampung.

Sejak berdirinya sampai dengan tahun 1971 DPRD Kota Bandar Lampung menggunakan sebutan DPRD Gotong royong. Selama DPRD Gotong royong setidaknya terdapat tiga periode kepemimpinan. Periode pertama yaitu sejak terbentuknya DPRD Gotong royong sampai dengan tahun 1968, Lembaga ini diketuai oleh M.S. Idroes. Periode berikutnya yaitu tahun 1968 sampai dengan 1969 DPRD Gotong royong dipimpin oleh Drs. Tjarmat dan pada periode tahun 1969 sampai dengan 1971 DPRD Gotong royong diketuai oleh Damhuri.

Tahun 1971 sebutan DPRD Gotong royong berubah menjadi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjung karang-Teluk betung. Pada periode tahun 1971 sampai dengan 1977 DPRD Kota madya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjung karang-Teluk betung dipimpin oleh Firmansah Daud. Selanjutnya Periode 1977 sampai dengan 1982 dan 1982 sampai dengan tahun 1987 DPRD Kotamadya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjung karang-Teluk betung dipimpin oleh Mansur Ramelan.

Sebagai catatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, sebutan Kotamadya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjung karang-Teluk betung dirubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar lampung dan bersadarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 dan Keputusan Walikota Bandar lampung Nomor 17 Tahun 1999 sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar lampung dirubah menjadi Kota Bandar lampung.

Periode tahun 1987 sampai dengan tahun 1992 DPRD Kotamadya Dati II Bandar Lampung dipimpin oleh H. Iing Tazuddin, SH. Periode berikutnya yaitu 1992 sampai 1997 dan periode 1997 sampai 1999 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh M. Sodik. Tahun 1999 Indonesia memasuki babak baru yaitu dari era Orde Baru menjadi era reformasi dan terjadi percepatan pelaksanaan Pemilihan Umum yang seharusnya Pemilihan Umum akan dilaksanakan tahun 2002 dimajukan dan diadakan Pemilihan Umum pada tahun 1999.

Ketua DPRD Kota Bandar Lampung pertama di era reformasi adalah Drs. H. Ridwan Sangkut dari PDI Perjuangan, yang memimpin DPRD Kota Bandar Lampung periode 1999-2004. Pada tahun 2002 H. Ridwan Sangkut Wafat sehingga kepemimpinan DPRD Kota Bandar Lampung digantikan oleh H.M. Hasyum Santosa dari PDI Perjuangan dari tahun 2002 sampai 2004. Periode 2004 sampai 2009 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. H. Azwar Yacub dari Partai Golkar. Periode tahun 2009-2014 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh H. Budiman. AS dari Partai Demokrat.

Periode 2014 sampai 2019 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh H. Wiyadi dari PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung masa jabatan 2019 sampai 2024 dipimpin oleh H. Wiyadi (PDI Perjuangan) sebagai Ketua, Aderly Imelia Sari (Partai Gerindra) sebagai Wakil Ketua I, Aep Sarupudin (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai Wakil Ketua II dan H. Edison Hadjar (Partai Amanat Nasional) sebagai Wakil Ketua III.

#### **4.2.2 Kedudukan, Tugas, Hak dan Kewajiban**

DPRD Kota Bandar Lampung merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota. Sebagai representasi rakyat, DPRD Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Tugas dan wewenang DPRD Kota Bandar Lampung adalah:

1. Membentuk Peraturan Kota Bandarlampung yang dibahas dengan Walikota untuk mendapat persetujuan bersama
2. Menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandarlampung bersama dengan Walikota
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kota Bandar Lampung dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Walikota, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung, kebijakan Pemerintah Kota dalam melaksanakan program pembangunan Kota Bandar Lampung.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Kota Bandarlampung.
6. Meminta Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Anggota DPRD Kota memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD Kota juga memiliki hak mengajukan Rancangan Perda Kota Bandar Lampung, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPRD Kota, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD kota berhak meminta pejabat negara tingkat Kota, pejabat pemerintah Kota, badan hukum, atau warga masyarakat memberikan keterangan. Jika permintaan tidak dipatuhi, maka dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Pimpinan dan anggota DPRD Kota memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi dan mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan kepada pejabat pemerintah Kota Bandar Lampung

#### **4.2.3 Peraturan Tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung**

Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

1. Daerah Kota Bandar Lampung adalah Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan, oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan

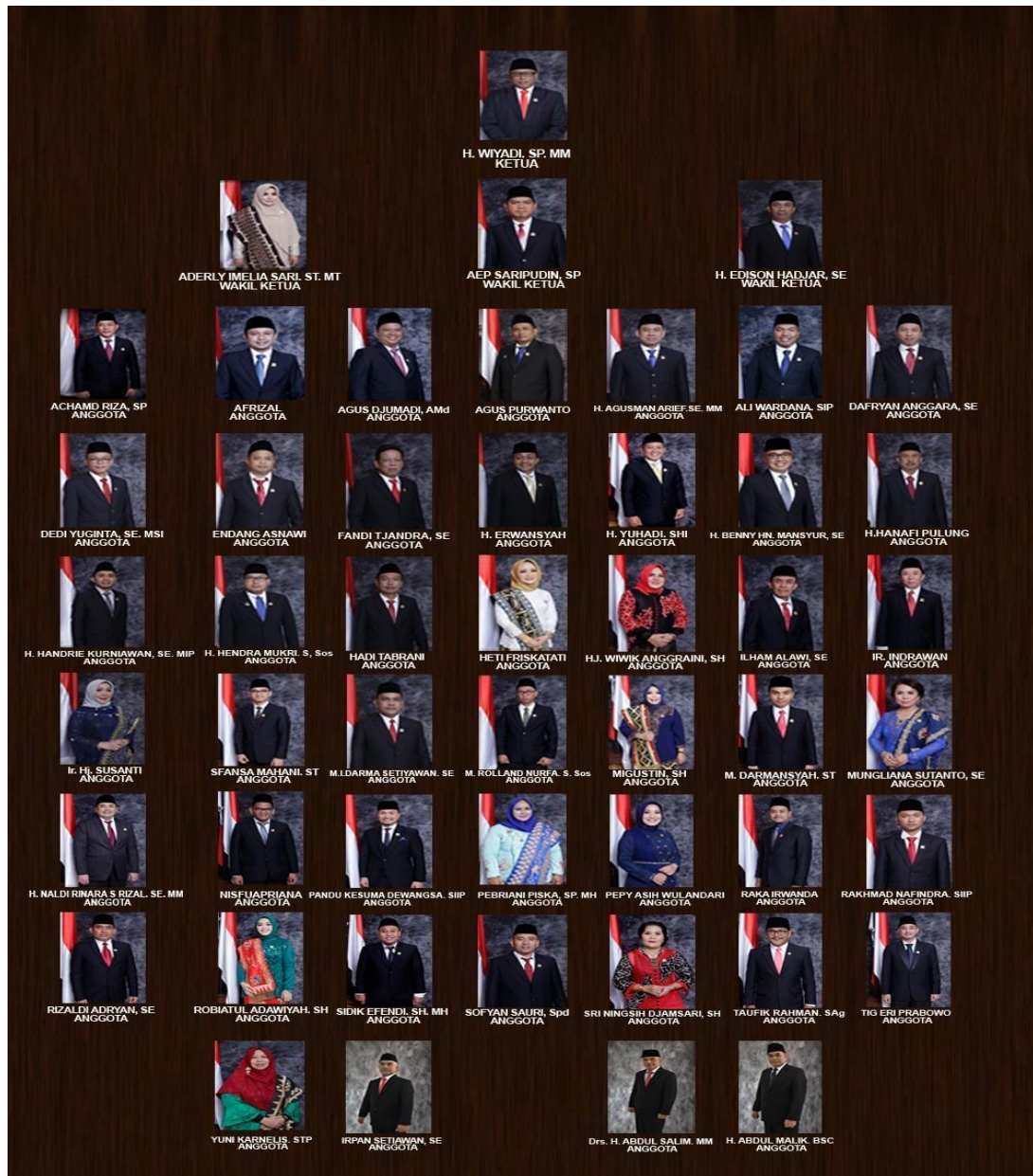
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Bandar Lampung.

3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi adalah merupakan Pengelompokan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Undang-undang. Fraksi gabungan adalah fraksi yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.
4. Alat kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kota Bandar Lampung. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut BK adalah alat kelengkapan DPRD Kota Bandar Lampung yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung; Alat Kelengkapan Lainnya adalah Alat Kelengkapan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan kelembagaan DPRD Kota Bandar Lampung. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Rapat Paripurna DPRD, selanjutnya disebut rapat paripurna, adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin

oleh Pimpinan DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD.

7. Kode Etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Keputusan DPRD adalah keputusan yang diambil melalui rapat paripurna. Masa Sidang adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan terutama didalam gedung DPRD. Masa Reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar Masa Sidang, terutama diluar gedung DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja.
8. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota, selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Kota Bandar Lampung. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Gubernur adalah Gubernur Lampung. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya di sebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bandar Lampung. Warga masyarakat adalah warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.

#### 4.2.4 Struktur Organisasi DPRD Kota Bandar Lampung



Gambar 4. Struktur Organisasi DPRD Kota Bandar Lampung

### **4.3 Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung**

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

#### **4.3.1 Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung**

Visi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung adalah:

“Terwujudnya Perdagangan Kota Bandar Lampung yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan”.

Berdasarkan visi di atas, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berhubungan dengan Perdagangan, Perpasaran, dan Kemetriologian akan berupaya seoptimal mungkin guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dengan didukung oleh keinginan segenap Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk selalu melakukan perubahan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Misi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu:

1. Meningkatkan dan memperkuat sektor Perdagangan Kota Bandar Lampung;
2. Meningkatkan daya dukung insfrastruktur pembangunan pasar;
3. Meningkatkan pengawasan tertib ukur.

Pelayanan prima adalah upaya yang dilakukan aparat Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pasar dalam hal ini pedagang dan pembeli secara cepat, tepat, terarah, dan teratur secara profesional

#### **4.3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung**

##### **Tujuan**

Penjabaran dari misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Perdagangan;
2. Mewujudkan Kenyamanan bagi Pedagang, Pembeli, Pengunjung, dan Pengguna Pasar;
3. Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Tertib Ukur.

##### **Sasaran**

Sasaran merupakan sesuatu yang ingin di capai pada jangka pendek dengan di tetapkannya sasaran, diharapkan tujuan dapat tercapai. Sasaran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, sebagai alat ukur tercapainya kinerja kebijakan dan program tersebut adalah:

1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah;
2. Terciptanya Pasar Tradisional Modern yang Tertib, Bersih, dan Indah;
3. Terlaksananya tertib ukur.

### **4.3.3 Tupoksi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung**

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung merupakan unsur penunjang tugas Kepala Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan meliputi Perdagangan, Bina Pasar dan Metrologi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **4.3.4 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung**

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Dinas
  1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metrologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
    1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metrologi;

2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metrologi;
3. Pengoordinasian dengan instansi lain dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan dibidang perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metrologi;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

## 2. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas dibidang kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
  1. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan informasi;
  2. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
  3. Pengelolaan urusan keuangan;
  4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas dinas;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3), Sekretaris dibantu oleh:

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### 3. Bidang Perdagangan

1. Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perdagangan meliputi perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN), Pemberdayaan Konsumen dan Energi Sumber Daya Mineral;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (2), Bidang Perdagangan mempunyai tugas fungsi :
  1. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN) serta Pemberdayaan Konsumen;
  2. Pembinaan dalam upaya peningkatan komoditas ekspor impor sesuai dengan potensi pasar baik didalam maupun diluar negeri;
  3. Penyusunan rencana pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN) berdasarkan potensi sumber daya alam dan Sumber Daya Manusia yang tersedia;
  4. Pembinaan dan fasilitas terhadap pemberian rekomendasi izin/pendaftaran Jasa Bisnis dan Jasa Distribusi, Wajib Daftar Prusahaan, Minuman Beralkohol, SIUP bahan berbahaya, pengakuan pedagang kayu antar Pulau dan permohonan komoditas bersubsidi;
  5. Pengawasan dan Fasilitas terhadap harga pasar dan distribusi kebutuhan bahan pokok;
  6. Penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga dan pihak lainnya dibidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN), pemberdayaankonsumen serta pengawasan peredaran barang dan perlindungan konsumen;

7. Pelaksanaan fasilitas terhadap pembinaan pemasaran dan promosi usaha;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Perdagangan Luar Negeri (PLN) serta Pemberdayaan Konsumen;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3), Bidang Perdagangan dibantu oleh :
1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
  2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
  3. Seksi Pemberdayaan Konsumen.
5. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang.
4. Bidang Bina Pasar
1. Bidang Bina Pasar dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
  2. Bidang Bina Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perdagangan meliputi bina usaha, permodalan, sarana dan logistik, bina pasar dan informasi;
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (2), Bidang Bina Pasar mempunyai fungsi :
    1. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Pasar meliputi pembangunan sarana prasarana dan pembinaan pedagang pasar;
    2. Penyusunan rencana pengembangan pasar tradisional dan pasar modern dan pengawasan perdagangan retail;
    3. Pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian rekomendasi terhadap pembangunan dan pengembangan pasar modern;

4. Pengawasan dan fasilitasi terhadap harga pasar dan distribusi kebutuhan bahan pokok pada pasar tradisional;
  5. Pelaksanaan sebagai upaya peningkatan akses pasar sebagai pusat sarana distribusi perdagangan;  
Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3), Bidang Bina Pasar dibantu oleh :
1. Seksi Bina Usaha dan Permodalan;
  2. Seksi Sarana dan Logistik;
  3. Seksi Bina Pasar dan Informasi.

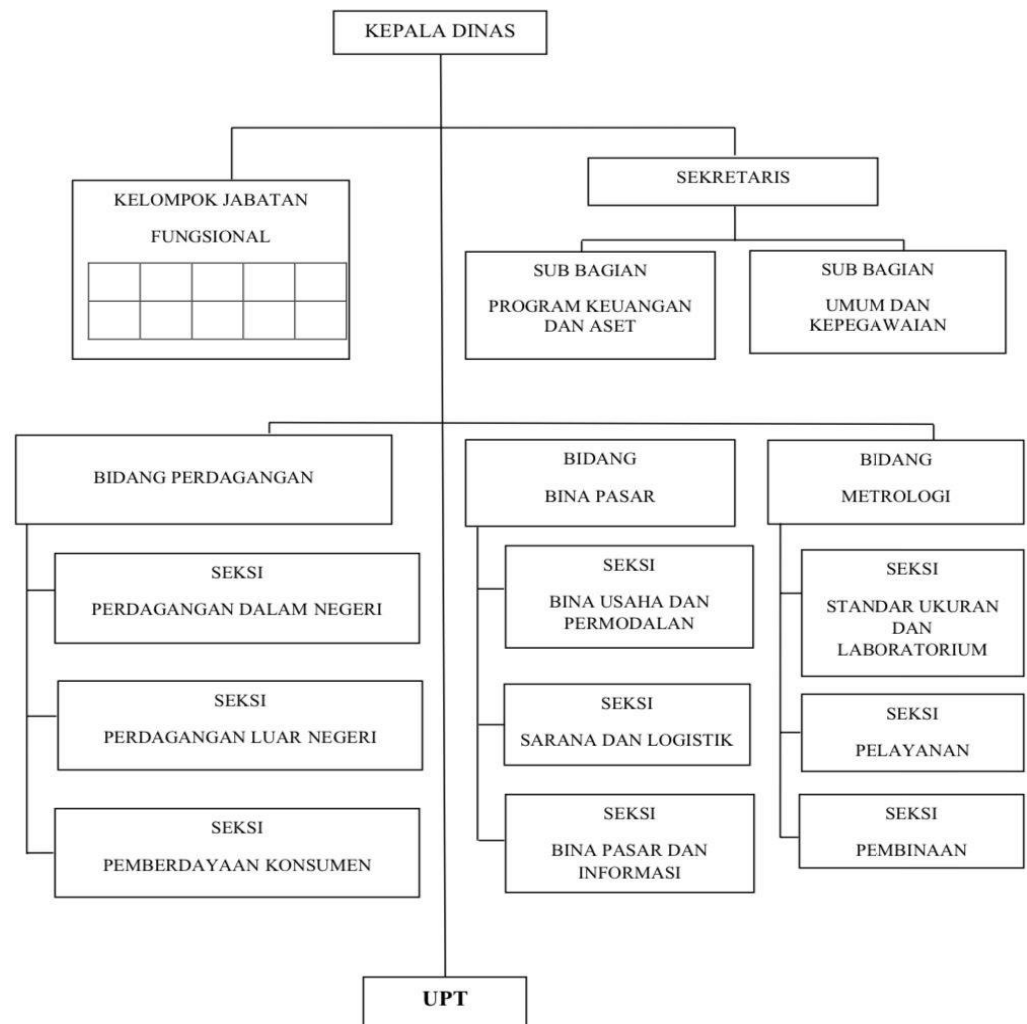
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Metrologi
1. Bidang Metrologi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
  2. Bidang Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengawasan kemetrologian, alat ukur, takaran dan timbangan;
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Metrologi mempunyai fungsi :
    1. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Metrologi meliputi setifikasi mutu barang, pengujian alat ukur, takar, timbang dan pelayanan tera;
    2. Pelaksanaan evaluasi dan verifikasi standar ukuran laboratorium alat ukur, tera ulang, takar dan timbang;
    3. Pembinaan dan sosialisasi terhadap kebijakan metrologi legal;
    4. Pembinaan dan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

5. Pelaksanaan dan pendokumentasian kebijakan standar ukuran laboratorium;
  6. Pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian rekomendasi terhadap pembangunan timbangan pada unit perdagangan;
  7. Pengoordinasian dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan pada bidang metrologi meliputi alat ukur, takar, timbang, tera dan perlengkapannya;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3), Bidang Metrologi dibantu oleh :
1. Seksi Standar Ukuran dan Laboratorium;
  2. Seksi Pelayanan;
  3. Seksi Pembinaan.
5. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) melaksanakan program kegiatan dalam lingkup wilayah pasar, yaitu:
1. Pengelolaan ketertiban, penataan dan pembinaan pedagang pasar.
  2. Pengelolaan pembangunan, renovasi dan pemeliharaan aset pasar.
  3. Pengelolaan kebersihan dan keindahan pasar .
  4. Pengelolaan pendapatan retribusi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
3. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4.3.5 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung



*Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung*

#### 4.4 Gambaran Umum Pola Artikulasi dan Agregasi

Partai Politik merupakan salah satu alat penggerak demokrasi dalam suatu negara, sebagaimana diketahui bahwa Partai Politik memiliki peranan yang penting dalam menjembatani hubungan antara rakyat dan pemerintah/negara. Artikulasi dan Agregasi adalah salah satu tugas dari partai politik dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik dan sosialisasi politik.

Yang mana artikulasi merupakan suatu proses penampungan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam Lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa artikulasi merupakan proses pengumpulan dan penyerapan aspirasi masyarakat, baik berupa kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan masyarakat yang kemudian dapat tersampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Sedangkan Agregasi merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang mewakili seluruh lapisan masyarakat tersebut dapat diserap secara ringkas dan terperinci untuk selanjutnya dapat menghasilkan alternatif kebijakan dari pemerintah. Yang mana partai politik berperan untuk menjembatani itu semua sebagai wakil dari rakyat dalam proses formulasi kebijakan yang akan ditetapkan untuk memenuhi tuntutan, kebutuhan dan kepentingan rakyat tersebut.

Alternatif kebijaksanaan hakekatnya merupakan rumusan-rumusan kebijaksanaan umum, dimana kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang pernah diartikulasikan dapat diakomodasikan, lalu dikombinasikan dan selanjutnya dikompromikan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Agregasi dan Artikulasi berkaitan dengan partai politik, yang mana partai politik merupakan bagian dari negara yang menganut demokrasi. Penerapan agregasi dan artikulasi tersebut dapat dilihat di berbagai wilayah di Indonesia, sebagai salah satu negara yang demokratis.

Berdasarkan pengamatan peneliti, berbagai wilayah di Indonesia juga tentu memiliki partai politik yang mengimplementasikan fungsinya yaitu komunikasi politik khususnya agregasi dan artikulasi. Pada penelitian Usman (2021) yang mana penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan partai politik, sebagai fungsi yang bersentuhan langsung dengan aspirasi masyarakat. Keberadaan partai politik telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2011 sebagai organisasi yang memiliki fungsi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pengendali konflik dan rekrutmen anggota. Dalam konteks demokrasi peran partai sangat dibutuhkan dan sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah.

Implementasi artikulasi dan agregasi kepentingan yang dijalankan oleh DPC PKB Kabupaten Pasuruan yang telah menjalankan fungsi tersebut dengan jelas. Artikulasi yang dijalankan oleh DPC PKB Kabupaten Pasuruan menggunakan tiga pendekatan yaitu ruang rakyat, ruang musyawarah, dan masa reses. Adapun, agregasi kepentingan untuk menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi bidang disesuaikan dengan kebutuhan aspirasi yang disampaikan dan evaluasi terhadap sistem agregasi kepentingan. proses artkulasi dan agregasi kepentingan sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan kebijakan dengan serap aspirasi masyarakat ataupun kelompok kepentingan, kedua fungsi tersebut sangat melekat di dalam tubuh partai politik sebagai fungsi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dapat dinilai bahwa di Kabupaten Pasuruan, Partai PKB telah berhasil menerapkan pola artikulasi dan agregasi dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik.

Selain itu, proses artikulasi dan agregasi kepentingan terdapat faktor penghambat yaitu proses *recofusing*, sosialisasi program dan penjangingan apirasi yang belum merata. Selain faktor penghambat aad faktor pendukung yaitu meningkatnya daya nalar masyarakat, peran kyai dan ulama NU di masyarakat, pola relasi DPC PKB dan Fraksi PKB dapat dikatakan dalam proses artikulasi dan agregasi kepentingan merupakan fungsi yang harus

dijalankan oleh partai karena untuk memenuhi kebutuhan atau aspirasi masyarakat dan kelompok kepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhana (2018) yaitu penelitian ini berfokus pada peran PDI-P DKI Jakarta dalam perumusan kebijakan perburuhan di DKI Jakarta. Isu-isu mengenai perburuhan sendiri, menjadi sebuah isu yang cukup strategis dan populis dalam kehidupan politik di Indonesia. PDI-P, sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia memiliki fokus yang cukup besar terhadap persoalan perburuhan dan juga memiliki kedekatan secara ideologi serta nilai-nilai perjuangan dengan kaum buruh di Indonesia.

Atas dasar itu, dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk menakar sejauhmana peran dari PDI-P khususnya PDI-P DKI Jakarta dalam memperjuangkan kehidupan perburuhan di DKI Jakarta melalui perumusan kebijakan di pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajah organisasi PDI-P DKI Jakarta pada tingkat akar rumput dan ditingkat kantor pusat masih lemah dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan mengenai persoalan buruh, sehingga tidak adanya usulan kebijakan mengenai perburuhan yang muncul.

Usulan kebijakan yang ada, praktis hanya berasal dari inisiatif organisasi PDI-P DKI Jakarta di tingkat jabatan publik yaitu mendorong revisi Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan dan mengusulkan Peraturan Daerah tentang aturan waktu kerja bagi ibu hamil. Dalam hal ini, PDI-P khususnya di Jakarta dalam memperjuangkan kehidupan buruh masih tidak maksimal sehingga tidak ada usulan kebijakan yang menjadi solusi dari permasalahan buruh di Jakarta.

Penjabaran diatas merupakan gambaran yang terjadi tentang pola artikulasi dan agregasi dari berbagai partai di beberapa daerah lain. Penelitian ini berusaha mengkaji pola artikulasi dan agregasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap kepentingan Pedagang Kaki Lima di Pasar SMEP Kota Bandar Lampung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

yaitu perbedaan partai dan objek penelitian yang dikaji yaitu mengkaji pola artikulasi dan agregasi dari Partai PDI Perjuangan terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar SMEP Kota Bandar Lampung.

Berkaitan dengan pembangunan di setiap daerah, baik pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Pendidikan, Keagamaan, serta dalam pembangunan sarana dan prasarana umum yang digunakan masyarakat sudah tentu berhubungan erat dengan keikutsertaan pemerintahan daerah baik Eksekutif maupun Legislatif. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada banyaknya proyek pembangunan infrastruktur dan sarana umum yang banyak terjadi permasalahan sehingga menimbulkan pada kemangkakan pembangunan pada proyek proyek yang ada di daerah.

Masalah pembangunan proyek yang mangkrak bisa di landasi oleh beberapa faktor yang pertama keuangan yang melemah dari pihak kontraktor yang hanya memiliki uang muka saja kemudian pada tahapan selanjutnya untuk pendanaan tahapan proyek selanjutnya dana dari kontraktor yang tidak bisa di pertanggung jawabkan dan tidak professional dalam bekerja sehingga proses pengerjaan terhenti, yang kedua minimnya Feasibility Study dalam pembangunan sehingga kurangnya analisis yang kuat baik dari segi dana, lokasi, rancangan pembangunan, rancangan anggaran pembangunan serta proses pelelangan proyek.

Lalu, yang ketiga yaitu adanya keterlambatan pembangunan karena kelalaian atau kesalahan dari kontraktor sehingga dapat menimbulkan identifikasi durasi pengerjaan yang tidak tepat, gambaran rencana proyek yang tidak jelas, ketidaktepatan perencanaan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja yang buruk. Keempat adanya patronase politik yang terjadi pada saat pelelangan proyek yang didasari politik balas budi dari suatu kepala daerah kepada kelompok tertentu yang telah membantu dalam segala hal untuk memenangkan pemilu.

Disini peneliti mengambil contoh pembangunan Pasar Impres Desa Tatakarya, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara yang di mulai sejak tahun 2019 hingga saat ini belum ada titik terang penyelesaiannya. Berdasarkan berita *online* dari Kumpastuntas.co (diakses: 19 Juni 2022, pukul 19.20) Hal tersebut terjadi karena adanya Patronase Politik yang di lakukan oleh pimpinan daerah kepada kelompok tertentu yang dimana pihak ke-3 pengejaan proyek tersebut adalah tim sukses dari kepala daerah terpilih tersebut, berdasarkan informasi yang di dapat kedua belah pihak melakukan persetujuan pemenangan tender proyek dengan perjanjian kepala daerah tersebut mendapatkan *fee* proyek sebesar 15% apabila pihak ke-3 menyetujui maka proyek tersebut di jatuhkan kepada pihak ke-3 tersebut yang dimana adalah salah satu tim sukses dari kepala daerah terpilih tersebut yang berujung pada OTT yang di lakukan KPK kepada kepala daerah tersebut pada tahun 2019.

Di daerah kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Lampung masih banyak sekali proyek pembangunan sarana dan prasarana umum yang mengalami penundaan pembangunan salah satunya Pasar SMEP yang berada di Kota Bandar Lampung. Adapun sejarah singkat Pasar SMEP, pada tahun 2003 pada masa kepemimpinan Walikota Suharto perancangan Pasar SMEP dilakukan, semula pasar ini di tangani oleh PT. Teguh Jaya Lestari dengan nomor surat 06 tahun 2003 pada hari senin, 20 oktober 2003, luas tanah bangunan 6765 meter persegi serta fasilitas terbangun took/kios sebanyak 152 unit, los amparan sebanyak 260 unit, kantor UPT, musholla, kantor satpam WC umum, dan TPS sampah.

Proyek pembangunan Pasar SMEP modern yang dicetuskan pada 2003. Pembangunan Pasar SMEP awalnya berkonsep cukup megah, dengan konsep seperti mal dan hotel. Proyek tersebut awalnya dikerjakan pihak ketiga PT Prabu Artha milik Ferry Sulisty. Rencananya, pasar itu akan kian modern dan berlantai delapan.

Proyek dimulai dengan merubuhkan bangunan lama dan menggali tanah sedalam lebih dari lima meter untuk area basement. Akan tetapi, proyek belum tuntas, bos PT Prabu Artha sudah kabur. Pasar tradisional bersejarah tersebut pun telah dirubuhkan, padahal pemilik kios telah membayar uang muka untuk kios baru yang justru tak jelas nasibnya. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lampung akan melanjutkan proyek pembangunan Pasar SMEP menggunakan dana APBD. Rancangan bangunan pasar yang sebelumnya berwujud pasar modern dan mal, serta ada hotelnya, kini diganti menjadi dua lantai. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap.

Kemudian pada tahun 2018 pada masa kepemimpinan Walikota Herman, HN proyek pembangunan pasar SMEP kembali di lanjutkan yang dimana hal tersebut di sambut baik oleh para pedagang pasar SMEP, pengerjaan pasar tersebut di kerjakan oleh PT. Asmi Hidaat yang terhitung memakan waktu selama empat tahun hingga tahun 2021. Pada saat ini pasar SMEP sudah selesai dan sudah di tempati kembali oleh para pedagang yang sudah cukup lama menanti selesainya pembangunan pasar SMEP.

Dari permasalahan yang sudah peneliti jabarkan diatas alasan peneliti memilih partai PDIP antara lain karena partai PDIP mempunyai slogan partai Wong Cilik yang dimana artinya partai PDIP mempunyai cita cita untuk memperjuangkan rakyat kecil, kemudian peneliti juga ingin mengetahui mengapa sejak tahun 2003 dan pada tahun 2018 proyek tersebut baru bias di lanjutkan karena pada saat itu PDIP menjadi partai pemenang dalam pemilu baik dari sisi eksekutif maupun legislatif.

Berdasarkan penjabaran diatas maka pada penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji peran partai dengan menggunakan teori Fungsi Komunikasi Politik yaitu Agregasi dan Artikulasi Kepentingan. Penelitian ini berfokus pada pembangunan Gedung Pasar SMEP yang telah mangkrak selama 16 tahun.

## **VI. PENUTUP**

### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

PDI-Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu pada tahun 2019 memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan Artikulasi dan Agregasi . Dalam menjalankan Artikulasi kepentingan dan Agregasi kepentingan politik. PDI-Perjuangan membawa perubahan kearah yang lebih baik terutama pada masyarakat yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar SMEP.

Artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan Kota Bandar Lampung melalui kader partainya yang ada di DPRD Kota Bandar Lampung melakukan sidak ke Pasar SMEP, kemudian melakukan dialog secara langsung serta menanyakan keluhan-keluhan mereka, dari sinilah dapat diserap aspirasi para pedagang dan disimpulkan apa saja kepentingan pedagang kaki lima yaitu lokasi berdagang yang layak dan nyaman untuk dijadikan bahan rujukan perumusan kebijakan selanjutnya.

Agregasi kepentingan yang dilakukan PDI-Perjuangan adalah mengusulkan pembangunan tahap lanjutan Pasar SMEP menggunakan APDB Kota Bandar Lampung dan melakukan pengawasan pembangunan untuk Pasar SMEP hingga selesai. Sesuai dengan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2018 tentang pengelolaan pasar dan penetapan tarif jasa pengelolaan pasar Pasal 10 mengenai pemugaran pasar. Sehingga

pembangunan pasar mulai di lanjutkan kemudian pada tahun 2021 Pasar SMEP sudah dapat ditempati oleh para pedagang.

## **6.2 Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung fraksi Partai PDIP pada masa mendatang hendaknya menempuh cara-cara yang efektif dan arif dalam realokasi dan revitalisasi pasar sehingga akan memberikan jalan keluar terbaik agar tidak ada lagi pedagang kaki lima yang memenuhi jalan.
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung beserta DPRD Kota Bandar Lampung diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan dana APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana umum di Kota Bandar Lampung.
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung diharapkan dapat menerapkan prinsip netralitas dengan cara selektif dalam penentuan pihak ketiga untuk menangani proyek pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung.
4. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung diharapkan dapat bersinergi dalam menjalankan tugas tanpa memandang latar belakang partai politik dalam membangun Kota Bandar Lampung.
5. Masyarakat, Pemerintah Kota Bandar Lampung, DPRD Kota Bandar Lampung dan Partai Politik diharapkan dapat bekerjasama dalam membangun Kota Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel dan Sidney Verba. 1965. *The Civic Culture*: Little Brand Co.
- Budiardjo, Miriam. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: Gramedia Pustaka. Jakarta. 481 hlm.
- Danial, Oded. 2009. *Wawancara Penelitian Tesis di Kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh*.
- Fylan. 2005. *Semi-Structured-Interviews*: Oxford University Press. New York. 65-77 p.
- Hasibuan, S. F. 2013. *Artikulasi dan Agregasi Kepentingan dalam Kebijakan Publik (Studi Tentang Peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas dalam Penentuan Kebijakan Publik*.
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*: Gaung Persada. Jakarta.
- Jenli, Maarotong. 2020. *Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud)*: Jurnal Politico 10(2).
- Kumpastuntas.co. 2019. *Proyek Pasar Rakyat Tatakarya Terancam Mandek Pasca Bupati Lampura Ditangkap KPK*: [www.kumpastuntas.co](http://www.kumpastuntas.co). diakses pada tanggal 19 Juni 2022.

- Mas'ood, Mochtar dan MacAndrews, Colin. 1981. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Miles dan Huberman, dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook. Edition 3*. USA: Sage Publications
- Moleong, J. L. (2011). *Metodelogi Peneleitian Kualitatif* (revisi). Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Zein, Abdullah. 2012. *Fungsi Komunikasi Politik Dalam Pemilu (sebuah tinjauan terhadap kesuksesan dan kegagalan partai politik dalam pemilu)*.
- Raco, Jozef. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Ramadhana, Roy. 2018. *Partai Politik dan Kebijakan Perburuhan (Studi Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi DKI Jakarta Dalam Perumusan Kebijakan Perburuhan di DKI Jakarta Periode 2015 - 2017)*.
- Rosana, Ellya. 2012. *Partai Politik dan Pembangunan Politik: Jurnal Tapis*.
- Saputro, Usman Adi. 2021. *Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan DPC PKB Kabupaten Pasuruan pada Masa Pandemi Covid-19*.
- Solihin, Olih. 2018. *Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*. Jurnal Agregasi.

- Solihin, olih. 2018. *Implementasi fungsi artikulasi dan agregasi PKS Kota Bandung*. Jurnal Agregasi vol 6 no 1.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d*. Intro ( PDFDrive ).Pdf.
- Sulaksono, Juli dan Nizar Zakaria. 2020. *Peranan Digital Marketing bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) desa Tales kabupaten Kediri*. Generation Journal. Vol. 4 (1) 41-48
- Suranto. 2014. *Peran Partai Politik dalam Formulasi Kebijakan Publik: Studi Kasus PDIP Kabupaten Kulonprogo Periode 2010-2012*. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik UMY. Yogyakarta.
- Syaiful, Fahmi Fadlillah dan Elihami Elihami. 2020. *Penerapan Analisis SWOT terhadap Strategi Pemasaran Usaha Minuman Kamsia Boba Milik Abdullah di tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bangkalan*. Jurnal Edukasi Nonformal. 343-359.
- Wahid, Umaimah. 2016. *Komunikasi Politik: Teori, Konseo, dan Aplikasi di Era Media Baru*. Sombiosa Rekatama Media. Bandung.
- Wijaya, Ikhwan. 2021. *DPRD minta pemkot merangkul pedagang smep*. [www.lampungrilis.com](http://www.lampungrilis.com). diakses pada tanggal 22 oktober 2021 pukul 21.38 wib.
- Zubaedi. 2013. *Buku Pengembangan Masyarakat*. Kencana Publisher. Jakarta